ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta.

PRESIDEN JOKOWI:

Sensus Pertanian 2023 Demi Akurasi Kebijakan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) bertujuan untuk mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian.

"Sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa Sensus Pertanian ini dilaksanakan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," kata Presiden Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin (15/5).

Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan sensus pertanian ketujuh dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Statistik Pusat (BPS).

"Kita tahu, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu; tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk nggak ada?," tambah Jokowi.

Dia menyebut keluhan tersebut mungkin disebabkan karena suplai pupuk yang kurang, distribusi tidak benar, atau sebab lainnya. "Tapi, kalau datanya akurat, gampang sekali Oh, ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton, misalnya. Oleh karena itu, saya mendukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, sensus yang dilakukan 10 tahunan itu terlampau lama. "Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak, mungkin Rp 3 triliunan, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini," jelasnya.

Jokowi pun meminta agar Sensus Pertanian Tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya. "Sensus Pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya melakukan sensus di situ, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya, (pertanian) menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali," katanya.

Dia pun menyebut pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan. "Tiga ratus empat puluh lima juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan, dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari angkatan kerja," katanya.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023 tersebut. "Artinya, dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," imbuhnya.

Sensus Pertanian Tahun 2023 dilakukan untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data, baik di level nasional maupun internasional.

Selain itu, sensus tersebut serta dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional dengan mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).

Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data.

Kegiatan ST2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan seluruh kegiatan dijadwalkan berakhir pada 2024. Salah satu tahapan penting dalam ST2023 adalah pengumpulan data pada Juni-Juli 2023 yang melibatkan banyak petugas, baik dari organik BPS maupun para mitra.

(ANTARA)

Dinkes DIY Tangani Kasus Stunting dengan Pendekatan Siklus Kehidupan

YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan penanganan kasus stunting di lima kabupaten/kota di provinsi ini dilakukan dengan pendekatan siklus kehidupan.

"Intervensi yang kami lakukan dengan pendekatan siklus kehidupan karena stunting ini kejadiannya membutuhkan proses dalam waktu yang lama," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endang Pamungkasiwi di Yogyakarta, Senin (15/5).

Menurut dia, pendekatan siklus kehidupan diperlukan karena berdasarkan penelitian Dinkes DIY kasus stunting antara lain dipicu kurangnya nutrisi saat calon ibu masih remaja atau pada usia produktif. "Oleh karena itu, intervensi kami mulai sejak calon ibu masih usia remaja," ujar Endang.

Ia mengatakan Dinkes kabupaten/kota di DIY secara rutin melakukan program perbaikan gizi hingga memeriksa kadar hemoglobin (Hb) pada remaja putri sebagai calon ibu. Pasalnya, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 tidak sedikit remaja Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dan anemia.

ANTARA

Ilustrasi-Dinkes DIY tangani kasus stunting dengan pendekatan siklus kehidupan.

Mengacu data riset itu, sebesar 23,8 persen remaja putri mengalami anemia dan 8,7 persen remaja berusia 13-15 tahun termasuk dalam kategori kurus dan sangat kurus. "Hal itu kalau tidak dikelola dengan baik akan memiliki tingkat risiko melahirkan anak-anak stunting sehingga pemeriksaan Hb, pemberian tablet tambah darah, serta peningkatan pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan," kata dia.

Endang yakin dengan berbagai upaya pendekatan bidang kesehatan maupun edukasi akan mampu menekan angka stunting di DIY hingga mencapai 14 persen pada 2024 sesuai target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Ia menyebutkan prevalensi kasus stunting di DIY pada 2019 mencapai 21,04 persen, kemudian turun menjadi 17,3 persen pada 2021, dan kembali turun menjadi 16,4 persen pada 2022.

Berdasarkan pemantauan Dinkes DIY, sebaran kasus stunting di provinsi ini bukan hanya terjadi di pelosok desa, tetapi merata hingga wilayah perkotaan. "Hampir merata, artinya di kota ada dan di perdesaan juga ada," ujar Endang. **(ANTARA)**

Presiden Perintahkan Pembentukan Sistem Terpadu untuk Investor IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membentuk satu sistem daring terpadu atau one stop shop guna memfasilitasi dan mempermudah para investor menjajaki kerja sama di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan pembentukan sistem terpadu one stop shop ini bertujuan mempercepat segala proses perizinan IKN agar sesuai di lapangan dan peraturan perundangan yang berlaku. "Jadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat suatu one stop shop yang akan juga diikuti lembaga kementerian terkait lain, itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu," kata Bambang dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/5).

ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Kepala OIKN Bambang Susantono.

Bambang menjelaskan investor yang berminat menanamkan modal di IKN dapat mengunjungi sistem terpadu tersebut yang di dalamnya terhubung dengan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

Investor yang terkendala tentang perizinan dan insentif perpajakan dapat mengunjungi sistem tersebut sehingga dapat diimplementasikan sesuai kebijakan yang berlaku. "Ada masalah, ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha," kata Bambang.

Adapun Presiden Joko Widodo pada Senin menggelar rapat terkait percepatan investasi di IKN. Sejauh ini, sudah ada 209 nota kesepahaman atau Letter of Intent (LOI) yang diajukan oleh para investor kepada Otorita IKN. Dari 209 LOI tersebut, 36 di antaranya sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian non disclosure agreement di mana pembicaraan sudah lebih rinci karena ada pertukaran data. "Setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan, kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil," kata Bambang. **(ANTARA)**

HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

PUPR Optimistis Istana Presiden IKN Bisa Dipakai Upacara HUT RI 2024

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) optimistis pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN berjalan sesuai rencana dan dapat digunakan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Sejauh ini Insya Allah kami upayakan progressnya sesuai dengan rencana, sehingga Insya Allah pada Agustus 2024 bisa digunakan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga melalui teleconference yang diikuti di Jakarta, Senin (15/5).

Danis menambahkan, di depan Istana Kepresidenan terdapat area lapangan yang menjadi rencana upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Pembangunan Istana Kepresidenan dan Kantor Presiden di IKN Nusantara sejauh ini berjalan dengan baik. "Sejauh ini pembangunannya baik dengan progress lebih dari 12 persen untuk Istana Kepresidenan dan Kawasan Kantor Presiden," kata Danis.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis pembangunan Istana Kepresidenan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) akan selesai pada 2024. Presiden menargetkan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 2024 dapat digelar di kawasan tersebut setelah proses pembangunannya selesai.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pembangunan Istana Kepresidenan ini akan sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Namun, kemungkinan terdapat beberapa bagian yang harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Presiden juga memastikan bahwa Istana Kepresidenan ini akan langsung ditempati ketika proses pembangunannya telah selesai. Hal tersebut dilakukan agar kawasan IKN ini menjadi ramai, sehingga dapat meningkatkan geliat pembangunan di sekitarnya. **(ANTARA)**

Pantai Samas Jadi Kampung Bahari untuk Sejahterakan Masyarakat Pesisir

BANTUL - Wilayah Pantai Samas di Kelurahan Srigading, Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY), diresmikan sebagai Kampung Bahari Nusantara guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir daerah itu.

"Kampung Bahari Nusantara ini merupakan program TNI AL, yang terbagi ke dalam lima klaster yaitu klaster kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan," kata Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Yogyakarta Kolonel Laut Devi Erlita seusai peresmian Pembukaan Kampung Bahari Nusantara di Samas Bantul, Senin (15/5).

ANTARA/Hery Sidik

Penyerahan kunci rumah pintar di Kampung Bahari Nusantara Pantai Samas, Kabupaten Bantul, DIY.

Menurut dia, dalam setiap klaster tersebut TNI AL melakukan berbagai macam kegiatan, untuk kesehatan melakukan bakti sosial, kemudian untuk ekonomi membantu para masyarakat pesisir dengan memanfaatkan hasil laut yang diproduksi menjadi nugget ikan misalnya.

Kemudian kegiatan pendidikan, TNI AL mendirikan rumah pintar yang saat ini sudah dilengkapi dengan internet dan sarana prasarana, serta ada bantuan laptop dari Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk pariwisata juga pengembangan potensi wisata maritim.

Dia mengatakan program untuk mengembangkan Kampung Bahari Nusantara di Pantai Samas Bantul itu sebelumnya sudah digagas sejak beberapa bulan lalu, namun untuk peresmian bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul baru terealisasi 15 Mei. "Tujuan pertama ini kita ingin TNI AL bersinergi dengan pemda dalam hal ini dengan para Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), bahwa AL itu ada di segala wilayah, walaupun mungkin AL ada di daerah pulau pulau terpencil, tapi kami selalu hadir di tengah masyarakat," katanya.

Dia mengatakan Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI AL yang diresmikan secara serentak pada hari ini di 68 satuan komando kewilayahan. Dan di Yogyakarta, kampung bahari ini yang pertama, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. "Kami memilih Pantai Samas ini karena sangat kondusif untuk kegiatan ini dan kami menyasar masyarakat di pinggiran pantai ini. Kami tidak pernah berfikir ada negatif di sini, tapi positif karena apabila kita selalu dalam hal berfikir segala sesuatu akan mengikuti positifnya," katanya.

Lurah Srigading Bantul Prabowo Sugondo berharap kehidupan para nelayan, khususnya di Pantai Samas, lebih berkembang lagi. **(ANTARA)**